



ပိမိၵိၵ်ႉ ၵူၵ်းၵိၵ်ႉ တၢ်ပိ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ဣၵ်းၵူၵ်းၵိၵ်ႉ ၵူၵ်းၵိၵ်ႉ  
INSPEKTORAT DAERAH

ၵူၵ်းၵိၵ်ႉ ၵူၵ်းၵိၵ်ႉ ပိမိၵိၵ်ႉ ၵူၵ်းၵိၵ်ႉ ၵူၵ်းၵိၵ်ႉ ၵူၵ်းၵိၵ်ႉ ၵူၵ်းၵိၵ်ႉ  
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 14 NITI MANDALA, DENPASAR (80235)  
ၵူၵ်းၵိၵ်ႉ ၵူၵ်းၵိၵ်ႉ ၵူၵ်းၵိၵ်ႉ ၵူၵ်းၵိၵ်ႉ ၵူၵ်းၵိၵ်ႉ  
TELEPON (0361) 243931

EMAIL: [inspektorat@baliprov.go.id](mailto:inspektorat@baliprov.go.id) WEBSITE: <https://inspektorat.baliprov.go.id>

## NOTA DINAS

Kepada : Sekretaris Daerah Provinsi Bali  
Dari : Inspektur Daerah Provinsi Bali  
Tanggal : 30 November 2021  
Nomor : B.09.700/11515/IR.IV/ltprov  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Laporan Monitoring Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan s/d  
Triwulan IV

Menindaklanjuti hasil verifikasi Laporan MCP KPK Bersama ini kami laporkan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Benturan Kepentingan Pemerintah Provinsi Bali s/d Triwulan IV terkait pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Provinsi Bali melalui aplikasi melalui aplikasi *Website Whistleblowing System* bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dievaluasi s/d triwulan IV melalui fitur pelaporan aplikasi <https://wbs.baliprov.go.id> dimana hasil laporan pengaduan masih *nihil*, terkait hal tersebut beberapa kegiatan dilaksanakan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan pada ASN diperangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut,

- 1) Melaksanakan internalisasi penanganan benturan kepentingan melalui kanal pengaduan aplikasi *Website Whistleblowing System* kepada seluruh ASN,  
*aksi* : Inspektorat Provinsi Bali sudah membuat iklan layanan publik yang bertemakan pelaporan dengan menggunakan website whistleblowing system sebagai *early warning system*, video iklan layanan publik tersebut dapat dilihat di channel youtube Pemerintah Provinsi Bali <https://youtu.be/asmHb9HjNzw> atau di website Pemerintah Provinsi Bali:
- 2) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS dan BK kepada perangkat daerah  
*aksi* : monitoring dan evaluasi secara langsung ke perangkat daerah yang mempunyai fungsi pelayanan publik seperti UPT. Bapenda di kabupaten/kota seluruh Bali secara langsung ke lokasi pelayanan dengan metode kuisisioner dan wawancara langsung pada pejabat dan petugas pelayanan di UPTD.PPRD Bapenda Provinsi Bali, Surat Perintah Tugas Nomor 8909 Tahun 2021 untuk



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

melakukan Monitoring Evaluasi Benturan Kepentingan dan Whistleblowing Sistem di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Bali, dengan lampiran hasil kuisioner (<https://bit.ly/KueBKWBS>).

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan di 8 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali dan 1 UPTD PPRD Kota Denpasar yaitu :

- UPTD PPRD Kabupaten Badung
- UPTD PPRD Kabupaten Bangli
- UPTD PPRD Kabupaten Gianyar
- UPTD PPRD Kabupaten Klungkung
- UPTD PPRD Kabupaten Karangasem
- UPTD PPRD Kabupaten Jembrana
- UPTD PPRD Kabupaten Tabanan
- UPTD PPRD Kabupaten Buleleng
- UPTD PPRD Kota Denpasar

3) Memberikan bimbingan penyusunan pemetaan risiko benturan kepentingan dilingkungan kerja masing – masing dan pimpinan wajib melaksanakan internalisasi dilingkungan kerjanya, sehingga dapat melakukan tindakan pencegahan (*early warning system*) terhadap aksi benturan kepentingan yang akan terjadi.

Demikian Kami Sampaikan, selanjutnya mohon petunjuk dan arahan bapak Terima Kasih

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**INSPEKTUR**  
**I Wayan Sugiada**  
NIP. 19651231 198603 1 175



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE